

## Analisis Keterbukaan Informasi Anggaran pada Website Pemerintah Kota Surabaya

Faranova Aulia Rizkilah<sup>1)</sup>, Claudia Amelia Safitri<sup>2)</sup>, Eva Hany Fanida<sup>3)</sup>, Melda Fadiah Hidayat<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
E-mail: [claudiaameliasafitri@gmail.com](mailto:claudiaameliasafitri@gmail.com)

Article Information

Submit: 24-04-2025

Revised: 06-05-2026

Accepted: 31-05-2026

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi anggaran pada website Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta website resmi Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Fokus penelitian diarahkan pada ketersediaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan APBD (P-APBD), dan laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan melalui website resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan informasi anggaran secara terbuka melalui sistem e-budgeting dan portal transparansi anggaran sehingga masyarakat dapat mengakses dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran secara lebih mudah dan terstruktur. Keterbukaan informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Selain itu, penyediaan informasi anggaran melalui website pemerintah juga mendukung partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti penyajian informasi yang belum sepenuhnya sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyajian informasi dan pengembangan fitur website pemerintah daerah masih diperlukan agar keterbukaan informasi anggaran dapat berjalan lebih optimal.

**Kata kunci:** E-budgeting, Keterbukaan informasi, Kota Surabaya, Transparansi,

### Abstract

*This study aims to analyze budget information disclosure on the Surabaya City Government website as a form of transparency and accountability in regional financial management. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques conducted through documentation studies sourced from scientific journals, scholarly articles, and the official websites of the Surabaya City Government and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). The focus of the study is directed at the availability of information related to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Revised APBD (P-APBD), and budget realization reports published through the official regional government website. The results of the study indicate that the Surabaya City Government has provided budget information openly through the e-budgeting system and budget transparency portal, enabling the public to access planning documents, budget implementation, and budget realization reports more easily and systematically. This information disclosure reflects the implementation of transparency and accountability principles in digital-based regional financial management. In addition, the provision of budget information through government websites also supports public participation in monitoring the use of public funds. However, several obstacles still exist, such as the presentation of information that is not yet fully simple and easily understood by the general public. Therefore, improving the quality of information presentation and developing features on regional government websites are still necessary to optimize budget information disclosure.*

**Keywords:** budget transparency, e-budgeting, information disclosure, Surabaya City, transparency.

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Menurut (Audyta et al., 2021), transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, salah satu komponen utama yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang berisi rincian pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. APBD juga memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai anggaran daerah menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan anggaran yang berasal dari sumber daya publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah mulai memanfaatkan sistem digital dan media internet sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah melalui penyediaan informasi publik pada website resmi pemerintah daerah. Website pemerintah daerah dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait kebijakan, program pembangunan, serta informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang dikenal aktif dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi. Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan berbagai sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan informasi terkait pengelolaan anggaran daerah melalui media digital seperti website resmi pemerintah. Melalui media tersebut masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih mudah mengenai penggunaan anggaran daerah. Keterbukaan informasi anggaran pada website pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua informasi anggaran disajikan secara lengkap, mudah diakses, atau mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan dokumen anggaran yang diperlukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, keterbukaan informasi anggaran masih perlu terus ditingkatkan agar dapat benar-benar mendukung transparansi pemerintahan.

Pengelolaan anggaran daerah juga dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran. Menurut (Adnyana et al., 2022), kondisi belanja daerah yang lebih besar dibandingkan pendapatan daerah dapat menyebabkan terjadinya defisit anggaran dan mempengaruhi stabilitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya transparansi informasi anggaran agar masyarakat dapat memahami keadaan keuangan daerah serta mengetahui bagaimana pemerintah mengelola anggaran publik secara akuntabel. Berdasarkan uraian tersebut, keterbukaan informasi anggaran melalui website pemerintah daerah menjadi hal yang penting untuk dikaji. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran daerah serta menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterbukaan informasi anggaran yang tersedia pada website Pemerintah Kota Surabaya serta sejauh mana informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan

ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai keterbukaan informasi anggaran pada Pemerintah Kota Surabaya. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana informasi anggaran disajikan dan diakses melalui sistem e-budgeting serta website resmi pemerintah daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta website resmi instansi pemerintah. Jurnal ilmiah digunakan untuk memperoleh landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang membahas e-budgeting, transparansi anggaran, dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, artikel ilmiah digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis dan memperkaya kajian konseptual.

Website resmi Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) digunakan sebagai sumber utama data empiris terkait informasi anggaran, APBD, serta laporan realisasi anggaran. Data dari website resmi tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi anggaran telah diterapkan secara nyata oleh pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara menghimpun, mempelajari, dan mengkaji berbagai sumber dokumen yang relevan dari jurnal ilmiah, artikel, serta website resmi instansi terkait. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengorganisasikan informasi berdasarkan kategori yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan realisasi anggaran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Keterbukaan Informasi Anggaran Pada Website Kota Surabaya

Keterbukaan informasi anggaran pada Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa implementasi sistem e-budgeting dan website resmi pemerintah telah berjalan dengan baik dalam mendukung transparansi keuangan daerah. Melalui kedua platform tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi anggaran secara runtut dan terstruktur, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan anggaran, hingga laporan realisasi anggaran. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Informasi anggaran yang disajikan secara digital juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berupaya membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari tersedianya dokumen APBD, program kegiatan perangkat daerah, serta laporan realisasi anggaran yang dapat diakses melalui website resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya (BPKAD Kota Surabaya, n.d.). Tahun 2025 menjadi salah satu periode penting dalam pengelolaan anggaran daerah, di mana pemerintah menetapkan APBD dengan fokus pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta melakukan publikasi perubahan anggaran melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD) sebagai bentuk transparansi kebijakan fiskal daerah (Pemerintah Kota Surabaya, 2025).

Berdasarkan data pada website resmi BPKAD Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan informasi transparansi anggaran Tahun 2025 yang dapat diakses masyarakat secara terbuka. Informasi tersebut meliputi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan APBD (P-APBD), serta laporan terkait pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk implementasi transparansi dan akuntabilitas publik. Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan Perubahan APBD (P-APBD) sebesar sekitar Rp12,354 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial masyarakat. Dalam dokumen P-APBD 2025 dijelaskan bahwa alokasi belanja fungsi infrastruktur mencapai sekitar 47,74%, sedangkan fungsi kesehatan sebesar

20,35% dan pendidikan sebesar 20,91%.

Pemerintah Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan karena adanya penurunan pendapatan dari opsen pajak sekitar Rp600 miliar. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan alternatif agar program pembangunan daerah tetap berjalan.

Informasi mengenai APBD dan realisasi anggaran tersebut dipublikasikan melalui website resmi pemerintah dan portal transparansi anggaran BPKAD Kota Surabaya. Melalui sistem e-budgeting dan website resmi tersebut, masyarakat dapat mengakses dokumen perencanaan anggaran, perubahan anggaran, hingga laporan realisasi anggaran secara lebih terbuka dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.

Hasil penelitian (Fikriyah & Trisnainingsih, 2022) menyatakan bahwa electronic budgeting mampu meningkatkan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena seluruh proses penganggaran dapat dipantau secara digital oleh masyarakat. (Gunawan, 2016) menjelaskan bahwa Kota Surabaya termasuk salah satu daerah yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran melalui penerapan sistem e-budgeting. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan e-budgeting memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Surabaya. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi anggaran dengan lebih mudah, cepat, dan terbuka sehingga pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah dapat berjalan lebih optimal.

Penelitian (Firmansyah et al., 2022) menjelaskan bahwa transparansi informasi keuangan pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran. (Wijaya et al., 2024) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis website mampu meningkatkan keterbukaan informasi karena data dapat diakses secara cepat, terbuka, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Pelaksanaan sistem tersebut dilakukan berdasarkan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Penerapan e-budgeting di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang cukup efektif sehingga daerah ini dianggap berhasil dalam mengimplementasikan sistem penganggaran berbasis digital dan menjadi salah satu contoh penerapan e-budgeting di Indonesia. Peran anggaran dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah memiliki risiko tinggi apabila tidak dikelola secara tepat, terutama terkait potensi penyimpangan atau tindak korupsi. Penerapan e-budgeting menjadi upaya untuk meminimalkan risiko tersebut melalui sistem penganggaran yang lebih transparan, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik.

Proses penganggaran di Kota Surabaya telah terbuka mulai dari tahap perencanaan program, penyusunan APBD, hingga pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Keterbukaan tersebut diperkuat melalui pemanfaatan website resmi pemerintah dan sistem e-budgeting yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi anggaran secara lebih mudah dan terstruktur. Keterlibatan serta pengawasan masyarakat mendorong akses informasi penganggaran yang semakin terbuka dan transparan. Partisipasi publik dalam proses penyusunan program dan kegiatan pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga turut serta dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran pada Pemerintah Kota Surabaya telah berjalan dengan cukup baik dan konsisten.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi anggaran pada Pemerintah Kota Surabaya telah berjalan dengan cukup baik melalui pemanfaatan sistem

e-budgeting dan website resmi pemerintah daerah. Informasi mengenai perencanaan anggaran, penyusunan APBD, perubahan anggaran, hingga laporan realisasi anggaran telah dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses informasi keuangan daerah dengan lebih mudah. Implementasi sistem digital tersebut menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai bagian dari good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan informasi anggaran juga didukung dengan tersedianya dokumen APBD dan P-APBD Tahun 2025 pada website resmi BPKAD Kota Surabaya yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses informasi publik secara terbuka. Penerapan e-budgeting tidak hanya membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Selain itu, keterbukaan informasi berbasis digital turut mempermudah masyarakat dalam memperoleh data anggaran secara lebih cepat dan terstruktur. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi keterbukaan informasi anggaran, terutama terkait kemudahan pemahaman informasi oleh masyarakat umum. Sebagian informasi anggaran masih bersifat teknis sehingga belum sepenuhnya mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun keterbukaan informasi anggaran di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik, peningkatan kualitas penyajian informasi dan aksesibilitas website masih perlu terus dilakukan agar transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi anggaran melalui penyajian informasi yang lebih sederhana, informatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Penyediaan informasi anggaran tidak hanya ditujukan bagi kalangan akademisi atau birokrasi, tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat umum agar informasi keuangan daerah dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Selain itu, pengembangan fitur pada website resmi pemerintah daerah perlu dilakukan, seperti penambahan visualisasi data dalam bentuk infografis, grafik, atau dashboard interaktif sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami kondisi dan realisasi anggaran daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Surabaya juga perlu meningkatkan sosialisasi terkait penggunaan website e-budgeting dan portal transparansi keuangan daerah agar masyarakat lebih aktif memanfaatkan akses informasi publik yang telah tersedia. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat menjadi salah satu bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat terus terjaga. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang lebih luas seperti wawancara, observasi langsung, atau survei kepada masyarakat sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas keterbukaan informasi anggaran dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan daerah yang dipublikasikan melalui website pemerintah.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Surabaya disarankan untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi anggaran melalui penyajian data yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Informasi anggaran yang masih bersifat teknis perlu disederhanakan agar tidak hanya dapat dipahami oleh kalangan akademisi dan birokrasi, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu mengembangkan fitur pada portal transparansi anggaran dan sistem e-budgeting, seperti penyajian infografis, grafik, dashboard interaktif, serta ringkasan anggaran dalam bahasa yang lebih populer. Langkah ini dapat meningkatkan kemudahan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi APBD,

perubahan APBD, maupun realisasi anggaran daerah.

Pemerintah daerah juga disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan website transparansi anggaran. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami cara mengakses informasi keuangan daerah dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran publik sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan penelitian yang lebih komprehensif dengan menggabungkan studi dokumentasi, wawancara, observasi lapangan, dan survei kepada masyarakat. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas keterbukaan informasi anggaran, tingkat literasi masyarakat terhadap informasi keuangan daerah, serta pengaruh keterbukaan informasi terhadap peningkatan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Sebagai pengembangan kajian, penelitian berikutnya juga dapat melakukan studi perbandingan dengan pemerintah daerah lain yang telah menerapkan sistem transparansi anggaran berbasis digital. Perbandingan tersebut akan menghasilkan praktik terbaik (best practices) yang dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi anggaran dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. G. S., Febrianti, C., & Amyar, F. (2022). Pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan surplus/defisit laporan keuangan pada ketahanan fiskal pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 141–152. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1266>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Fairness*, 11(2), 97–108. <https://doi.org/10.33369/fairness.v11i2.15206>
- Ahmad Wahyudi Zein, Sri Wahyuni, Sapna Maharani Saragih, Rahmi Sekar Andhini, & Khairunnisa Khairunnisa. (2025). Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Pemerintah Kota Medan. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(1), 344–356. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i1.5891>
- Aziz, N. J. A., Anggraini, W. A., & Pradani, T. (2024). Kajian Akuntabilitas Keuangan Dan Transparansi Dalam Menilai Kinerja Pemerintahan Desa. *Perwira Journal of Economics & Business*, 4(1), 109–117. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v4i1.301>
- Bernot, A., Tjondronegoro, D., Rifai, B., Hasan, R., Liew, A. W. C., Verhelst, T., & Tiwari, M. (2024). Institutional dimensions in open government data: A deep dive into Indonesia's Satu Data Initiative and its implications for developing countries. *Public Performance & Management Review*, 47(6). <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2377609>
- BPKAD Kota Surabaya.** (n.d.). *Beranda BPKAD Kota Surabaya*. Pemerintah Kota Surabaya. Diakses pada 11 Mei 2026. ([bpkad.surabaya.go.id](http://bpkad.surabaya.go.id))
- Fajrianto. (2022). E-government implementation and public service transparency. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAISS/article/view/1316>
- Firmansyah, A., et al. (2022). Transparency of local government financial reporting. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Fikriyah, T. M. , & Trisnarningsih, S. (2022). STUDI LITERATUR ELECTRONIC BUDGETING SEBAGAI PENINGKATAN TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD). *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 2(1), 17–27. <https://doi.org/10.33005/senapan.v2i1.168>



- Fransisca, F., Saiful, S., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171–182. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Kurnia, C., Posumah, J., & Plangiten, N. (2023). Digitalization of public administration and transparency. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/48678>
- Khoiriyah, A. Z., Yudi, Y., & Rahayu, R. (2024). Transparansi Informasi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2018. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 4(1), 96–115. <https://doi.org/10.22437/jar.v4i1.12318>
- Permana, D. (2023). E-government implementation in Indonesia. *Influence Journal*. <https://influence-journal.com/index.php/influence/article/view/193>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). APBD dan perubahan anggaran daerah. <https://surabaya.go.id>
- Prayitno, A. (2023). Innovation in public administration digitalization. *Journal of Government and Politics*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/23017>
- Rumimpunu, S. R., Tampi, J. R. E., & Londa, V. Y. (2021). E-government and public information transparency. *Jurnal Ilmu Sosial & Ekonomi Pembangunan*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/35437>
- Rosdawiyah, R., & Bandjar, A. (2026). KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN TRANSPARANSI MELALUI SISTEM SATU DATA PETA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT. *COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 1019–1031. <https://doi.org/10.51878/community.v6i2.10601>
- Wijaya, R., et al. (2024). Website-based public information system and transparency. *Jurnal Kebijakan Publik*.